



Dugaan Korupsi Alkes Unud

Tersangka Segera Disidang

Jakarta (Bali Post) -

Berkas perkara kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Khusus Universitas Udayana (Unud) atas nama tersangka MDM (Made Meregawa) dinyatakan lengkap atau P21. "Ya benar kasus tersebut hari ini masuk tahap dua (P21)," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Indriati di Jakarta, Jumat (18/9) kemarin.

Dengan lengkapnya berkas tersebut, maka selanjutnya dalam jangka waktu 14 hari, berkasnya akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dan menghadapi persidangan. "Rencananya akan disidang di Pengadilan Tipikor Bali," imbuh Yuyuk.

Menanggapi kelengkapan berkas perkaranya, usai menandatangani berkas kelengkapan perkaranya, Made Meregawa membenarkannya. Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya lebih lanjut perihal kasus yang melilitnya. "Ya, berkas saya lengkap (P21)," ucapnya singkat.

Dalam perkara kasus dugaan Alkes Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univer-

sitas Udayana tahun anggaran 2009, KPK menetapkan tersangka Made Meregawa dalam kapasitasnya selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek alkes itu. Selain Made, dalam proyek senilai Rp 16 miliar yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 miliar, KPK juga menetapkan tersangka terhadap anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Marisi Matondang. Atas perbuatannya, keduanya terancam 20 tahun pidana penjara, pasalnya dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam rangka mencari alat bukti tambahan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara kasus kedua tersangka, penyidik KPK sebelumnya juga memanggil mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Hal. 19
Mantan Karyawati

Mantan Karyawati

Dari Hal. 1

Selain Nazar, KPK juga memanggil pihak lainnya sebagai saksi yakni Clara Maureen, mantan karyawati Grup Anugerah/Permai Group,

perusahaan milik Nazaruddin. Selain keduanya, penyidik juga memanggil saksi-saksi lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka Made dan Marisi Matondang. Saat ini, Made

Meregawa sendiri telah ditahan di Rutan Salemba Cabang KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur. Tersangka lain atas nama Marisi Matondang, berkas perkaranya masih dalam tahap penyidikan. (wnd)

Edisi : Sabtu, 19 Sept 2015

Hal : 1



Kampanye Habiskan Rp 1,6 Miliar ✓

Amlapura (Bali Post) -

Pelaksanaan Pilkada Karangasem benar-benar menghabiskan banyak biaya. Untuk pelaksanaan kampanye saja, menghabiskan anggaran Rp 1,6 miliar. Dari total anggaran itu, anggaran banyak tersedot untuk iklan, bahan kampanye, hingga debat publik. Agenda debat publik dirancang menghabiskan anggaran Rp 350 juta.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat KPU Karangasem, I Gede Suwenda, Jumat (18/9) kemarin, merinci anggaran iklan mencapai Rp 470,4 juta, bahan kampanye Rp 412,2 juta, debat publik Rp 350 juta, dan alat peraga Rp 138,3 juta. Sementara, total anggaran KPU Karangasem lewat hibah Pemkab Karangasem melalui APBD Induk 2015 mencapai Rp 13,97 miliar. Khusus debat publik, Ketua Pokja Kampanye, I Gede Krisna Adi Widana, mengatakan rencananya dilaksanakan pada 22 dan 29 November. Nantinya disiarkan langsung di salah satu

televisi lokal dan nasional. Bagaimana teknis pelaksanaan dan panelis yang terlibat, akan dikoordinasikan lebih lanjut. Masalah yang nantinya diangkat dalam debat, tentu yang menjadi masalah serius Kabupaten Karangasem di berbagai bidang.

Agenda debat publik akan menjadi ruang bagi ketiga pasangan calon yakni pasangan nomor 1, I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati dari PDI-P, nomor urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri dengan Wayan Artha Dipa yang diusung Koalisi Karangasem Hebat (NasDem, Hanura, dan PKPI), serta nomor urut 3, I Made Sukerana dan Komang Kisid dari Partai Golkar, Gerindra, dan PKS, untuk menunjukkan kemampuannya. Khususnya dalam menjabarkan visi dan misinya dalam menghadapi ragam persoalan di Karangasem. Debat publik yang bakal disiarkan secara langsung itu bakal menjadi ruang bagi calon pemilih, untuk menentukan pilihannya. (kmb31)

Edisi : Sabtu, 19 sept 2015

Hal : 3



Kasus Dugaan Korupsi di BP3TKI

Saksi Mahkota Pojokkan Terdakwa

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sudah mulai memasuki pemeriksaan saksi mahkota. Sidang Kamis (17/9) lalu, yang dihadiri jaksa sebagai saksi adalah tersangka Trusdi Prio Sambodo. Kesaksiannya sempat memojokkan terdakwa Pagedh dan Prio Adi Santoso. Namun, akhirnya mereka saling bantah sebelum sidang ditutup majelis hakim diketuai Edward Harris Sinaga, dengan hakim anggota Dewa Suardita dan Hartono.

Di hadapan hakim dan jaksa Gusti Ayu Rai Artini dan Nyoman Sulitra, Trusdi mengaku memang dirinya yang diajak oleh Prio atas perintah Wahyu Matodang alias Dodik. Saksi mengatakan, dia diminta oleh Dodik mengambil uang di BNI, kemudian bersama Prio Adi Santoso ke BNI. "Saya yang masuk, setelah uang cair dari Nyoman Paramarta, kami serahkan ke Dodik," katanya.

Ditambahkannya, penarikan pertama adalah Rp 750 juta, kemudian lanjut lagi minta dicairkan Rp 750 juta. Penarikan kedua ini juga bersama Prio Adi Santoso dan diserahkan ke Dodik. Sedangkan yang ketiga adalah menarik uang Rp 450 juta, dan juga di BNI. Setelah uang diserahkan oleh Nyoman Paramarta sebagai pemilik lahan, uang ini jadi kacau. Namun, menurut saksi, uang itu diser-

ahkan ke Prio Adi Santoso. Kemudian, dikembalikan Rp 70 juta untuk kepentingan surat-surat ke Trusdi.

Namun dalam perjalanannya, uang itu diminta lagi oleh Prio Adi Santoso Rp 15 juta untuk yang pertama dan yang kedua Rp 15 juta. Sehingga sisa dana yang dipegang oleh Trusdi adalah Rp 40 juta. "Uang ini saya yang pegang, Rp 40 juta. Dan akhirnya saya serahkan ke polisi setelah kasus ini mencuat," ungkapny.

"Kalau tidak ketahuan, Anda ambil uang ini?" tanya hakim. "Bingung saya pak," jawab Trusdi seperti linglung.

Keterangan saksi yang memojokkannya itu, membuat Prio Adi Santoso "menggigit" juga. Kali ini, Prio Adi Santoso mengatakan bahwa penarikan uang hasil *mark-up* tanah Rp 450 juta itu, hanya diserahkan ke Prio Adi Santoso Rp 150 juta. "Sisanya yang bawa adalah Trusdi, saya hanya diserahkan Rp 150 juta. Bahkan yang bayar untuk biaya pajak dan lainnya, dari saya," kilah Prio Adi Santoso membantah kesaksian Trusdi.

Saling tuding antara saksi dan Prio Adi Santoso membuat hakim mulai makin gereget untuk membuka lebar-lebar kasus ini. "Bahaya juga kalian ini. Oke, akan semakin terbuka ini," ujar hakim ketua sambil tersenyum melihat perdebatan mereka. Akhirnya, Trusdi tetap pada kesaksiannya dan Prio Adi Santoso tetap membantahnya. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 13 Sept 2015

Hal : 2



Ranperda APBD-P 2015 Disetujui

Soal Efektivitas

Dewan Ingatkan

Penggunaan Anggaran

Gianyar (Bali Post) -

DPRD Gianyar dalam rapat paripurna, Jumat (18/9) kemarin, menyetujui Ranperda Perubahan APBD tahun 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada kesempatan itu, dewan meminta agar program pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak terutama di beberapa sektor yang menjadi prioritas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam pendapat akhir dewan yang disampaikan Wakil Ketua Ketua Jata disebutkan, dari hasil pembahasan seluruh anggota, dewan Gianyar menyimpulkan Ranperda telah menggunakan pendekatan terukur dan rasional terhadap potensi pendapatan yang ada. Sesuai struktur, Pendapatan Daerah dalam Ranperda APBD-P 2015 dirancang Rp

1,433 triliun lebih. Terdiri atas PAD Rp 408 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp 684 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 339 miliar lebih.

Sedangkan untuk belanja daerah dialokasikan Rp 1,66 triliun lebih, terbagi atas belanja tidak langsung Rp 1,105 triliun lebih atau 66,54 persen dan belanja langsung Rp 550

miliar lebih (33,46 persen).

Menurut Jata, dewan memahami perubahan anggaran tersebut diakibatkan sejumlah faktor. Salah satunya yakni kebutuhan pembangunan dan berbagai sektor lainnya yang mendesak untuk dilaksanakan.

Dewan, kata dia, juga menekankan soal program pemenuhan kebutuhan

masyarakat yang mendesak baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Dalam penggunaan anggarannya pada sektor-sektor tersebut termasuk sektor pertanian, harus dilakukan secara efisien. Pasalnya, sektor-sektor itulah yang merupakan urusan prioritas pemerintah, terlebih lagi pertanian menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Gianyar.

Sementara itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Made Togog tersebut, Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata menyampaikan

terima kasih atas disetujuinya Ranperda APBD-P 2015. Dikatakannya, keputusan tersebut adalah wujud komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Agung Bharata menambahkan, aspirasi masyarakat Gianyar hendaknya diserap secara bertahap untuk kemudian diaktualisasikan ke dalam setiap program dan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (kmb25)

Edisi : Sabtu, 19 Sep 2015

Hal : 13



SK Bupati Direvisi

Honor Penyelenggara Pilbup Sesuai Usulan KPU

Bangli (Bali Post) -

Kisruh honor penyelenggara Pilbup Bangli segera berakhir. Hal ini menyusul sudah mulai dilakukannya proses revisi SK Bupati Bangli No. 900/274/2015 terkait honor yang sempat dipangkas. Dengan direvisinya SK tersebut, maka honor penyelenggara Pilbup akan berkisar Rp 6,5 juta bagi ketua dan Rp 5,5 juta untuk anggota.

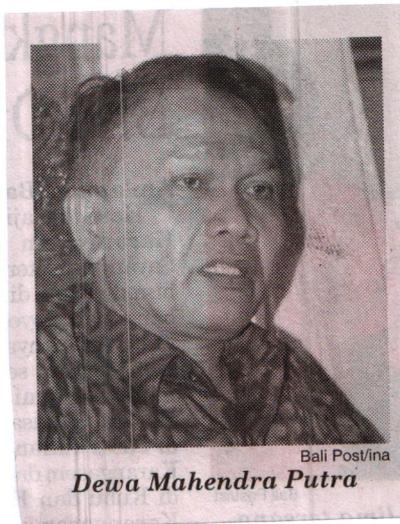
Penjabat (Pj.) Bupati Bangli Dewa Mahendra Putra saat ditemui siang kemarin mengungkapkan, saat ini dasar untuk merevisi SK Bupati Bangli yang memberikan honor Rp 2,5 juta bagi penyelenggara sudah jelas. Hal ini menyusul turunnya surat dari Pemprov Bali. Dimana surat itu mencabut surat Pemprov sebelumnya yang menyatakan

kajian Pemkab Bangli benar. "Surat dari Provinsi tadi pagi sudah saya jemput langsung ke Denpasar. Dengan itu, sekarang dasar hukum sudah jelas. SK Bupati Bangli sebelumnya sedang direvisi," tegasnya.

Dipaparkan, sesuai SK tersebut, honor untuk penyelenggara Pemilu di Bangli dikembalikan sesuai usulan

KPU dan Panwaslih Bangli sebelumnya. Bahkan Mahendra Putra juga mengaku sudah menginstruksikan untuk mempercepat revisi SK tersebut.

Dia menjanjikan kisruh honor yang selama ini mewarnai Pilbup Bangli akan tuntas paling lambat Rabu mendatang. "Maksimal Rabu mendatang, prosesnya sudah selesai. Kalau bisa maju, akan



Dewa Mahendra Putra

lebih baik," tegasnya. Sementara itu pada pagi kemarin petugas pengawas berasal dari PPL, Panwascam hingga Panwaslih mendatangi rumah jabatan Pj. Bupati Bangli. Kedatangan mereka yang dikoordinir Ketua Panwaslih Nengah Sandiarta, adalah untuk mempertanyakan kejelasan honor mereka.

Selama ini ketidakjelasan honor tersebut sempat membuat Panwaslih dan KPU beserta jajaran masing-masing kompak mengancam akan mengundurkan diri. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 19 sept 2015

Hal : 8



Terbentur Status Aset

Retribusi Tak Bisa

Dipungut di Padangbai

Amlapura (Bali Post) -

Terbentur status aset di pelabuhan rakyat Padangbai, membuat Pemkab Karangasem tak kuasa memungut pajak atau retribusi. Aset di pelabuhan rakyat itu masih milik pusat serta Pemprov Bali. Pemkab Karangasem tak berani memungut retribusi dari aset yang belum jelas menjadi milik sendiri.

Hal itu disampaikan Kadishub dan Pemadam Kebakaran Karangasem Drs. I Wayan Sutapa, M.Si., Jumat (18/9) kemarin di Karangasem. "Kami tentu tak berani memungut retribusi dari aset yang belum sepenuhnya milik Pemkab Karangasem. Nanti malah bermasalah atau jadi temuan BPK," katanya.

Soal banyaknya wisatawan atau pengelola *boat* bersandar memanfaatkan pelabuhan rakyat di Padangbai diakui Sutapa. Diakui pula uang

(retribusi-red) sudah ada dan tinggal mengambil atau memungut, tetapi tak bisa mengambil uang itu karena terbentur aturan status aset.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi mengatakan, Pemkab Karangasem belum mendapatkan apa-apa dari ramainya wisatawan lewat atau operator *boat* yang menggunakan pelabuhan rakyat di Padangbai. Soalnya, selain masalah status kepemilikan aset, juga aturan seperti Perda belum ada. Sebenarnya sudah ada celah karena sudah ada surat dari Kemenhub yang memberikan surat rekomendasi kepada PT Karangasem Sejahtera (KS) untuk mengelola pelabuhan, termasuk hak pengelolaan pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo Manggis. Namun, Perda PT KS yang diajukan sebelumnya ditolak sebagian

besar fraksi di DPRD Karangasem. Alasan penolakan mayoritas fraksi, karena PT KS dituding sebagian sahamnya menjadi milik pribadi atau kelompok tertentu.

Sumardi yang juga adik bungsu mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg itu mengatakan, tak ada kepemilikan pribadi di PT KS. Soalnya, sahamnya 80 persen Pemkab Karangasem dan hanya 20 persen andil Koperasi Pegawai Negeri Karangasem. Menurut Sumardi, jika Perda PT KS disahkan, akan bisa mengelola sembilan jenis bidang. Salah satunya bidang pengelolaan pelabuhan kapal pesiar di luar Pelabuhan Penyeberangan Padangbai-Lembar yang dikelola PT Pelindo. "Kalau PT KS mengelola pelabuhan, saya yakin paling tidak pemasukan Rp 10 miliar tambahan ke kas daerah per

Edisi : Sabtu, 19 Sept 2015

Hal : 13



tahun dengan mudah diraup. Saya dapat informasi dengan memungut *dana punia* saja terhadap kendaraan yang masuk ke Padangbai, Desa Pakraman Padangbai setahun bisa dapat Rp 1,3 miliar. Kalau Pemkab memungut retribusi tentu akan lebih besar lagi," tandasnya.

Dari pantauan dan informasi pengelola *boat*, penye-

berangan tiap hari ratusan wisatawan menyebrang ke gili. Pada Sabtu dan Minggu membeludak, rata-rata per hari bisa mencapai 600 orang. Saking ramainya, wisman antre menunggu dilayani pengelola *boat* menyebrang ke Gili Terawangan. Harga tiket menyebrang berkisar Rp 300 ribu sampai Rp 600 ribu per orang. (013)



Bali Post/bud

ANTRE - Wisatawan antre untuk diseberangkan pengelola boat di Padangbai menuju Gili Terawangan.

Edisi : Sabtu, 19 Sept 2015

Hal : 13